

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Winidyaningrum, 2010).

Dengan adanya akuntabilitas, maka banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami (Winidyaningrum, 2010). Suatu akuntabilitas yang baik maka akan diperoleh laporan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada pihak yang terkait dengan didukung adanya Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk laporan keuangan tersebut.

Dengan adanya hasil penelitian Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas (dalam Triantoro, 2011). Dan Amirudin (2009), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung (Kartikaningdyah, 2010). Maka dapat dijadikan suatu pedoman untuk pendukung suatu informasi laporan keuangan.

Selain pengendalian intern, dalam pelaksanaan pelaporan keuangan juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan (Wahyudi, 2011).

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk menunjang penyajian laporan keuangan, menurut Paket Tiga UU Keuangan Negara Tahun 2003 –2004, penerapan Sistem Aplikasi Teknologi Komputer (IT related) dengan didukung Bendahara atau pegawai yang menangani

pembukuan dan pengawasan seyogyanya memiliki pengetahuan dasar ilmu akuntansi (Majalah Pemeriksa, 2008:8 dalam Mulyono,2009).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*), karena pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Winidyaningrum, 2010). Agar penyajian data yang tidak sesuai dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi atau dihilangkan maka sesuai dengan penjelasan sebelumnya diperlukan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik agar akuntabilitas suatu laporan keuangan dapat diandalkan. Selain itu, untuk memperoleh laporan keuangan yang andal dan tepat waktu maka diperhatikan kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Penggunaan Aplikasi Teknologi Komputer merupakan media yang dibutuhkan pula dalam menunjang keberhasilan laporan keuangan agar dapat memenuhi kriteria *timelines* yang didukung dengan sumber daya manusia

berkualitas. Dalam Winidyaningrum (2010) dijelaskan bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Dapat dilihat bahwa pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan (Martanti, 2011).

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo (2008), dengan populasi yang berbeda. Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo (2008) memilih populasi yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan penelitian ini memilih populasi yaitu Pengelola bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada DPPKAD di Kabupaten Pemerintah Daerah Sekarisidenan Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN (STUDI EMPIRIS SEKARISIDENAN SURAKARTA)”**.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi perusahaan/institusi
  - a. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
  - b. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan/instansi untuk mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah.
2. Bagi pihak lain
  - a. Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca seputar pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
  - b. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu mengenai Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Keterandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktu (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pengendalian Intern Akuntansi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

## BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.